

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pajak reklame dan sanksi administrasi akibat terlambat membayar pajak reklame di kota Payakumbuh dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di kota Payakumbuh menggunakan sistem *Official Assessment System* , yaitu DPPKA kota Payakumbuh memungut langsung pajak reklame kepada wajib pajak. Sebelum reklame dipasang oleh penyelenggara reklame maka harus melapor izin pemasangan reklame kepada walikota Payakumbuh dalam hal ini melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh serta memperhatikan tata cara pemasangan reklame yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 60 tahun 2011. Pemungutan pajak reklame bersamaan dengan keluarnya SKP (surat ketetapan pajak). Dalam perkembangannya ada 9 jenis reklame yang dikelola oleh DPPKA yakni reklame papan/billboard/baliho, reklame kain, reklame melekat/sticker, reklame berjalan/mobil, reklame balon udara, reklame film/slide, reklame suara, reklame peragaan, dan reklame megatron/videotron/LED.

2. DPPKA kota Payakumbuh memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dalam hal ini terlambat membayar pajak reklame dengan prosedur pertama berupa surat pemanggilan kepada wajib pajak, dan apabila pemanggilan tersebut tidak diindahkan maka DPPKA kota Payakumbuh kemudian melakukan penetapan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%/bulan terhadap wajib pajak tersebut dan jika tidak diindahkan maka DPPKA langsung melakukan pembongkaran reklame tersebut. Dengan adanya sanksi pembongkaran ini dapat diartikan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa dalam penegakan aturan yang lebih tegas. Dalam hukum administrasi disebut juga dengan *bestuursdwang*. Pemungutan pajak reklame di Kota Payakumbuh tidak berjalan secara optimal apalagi maksimal hal ini dibuktikan dengan banyaknya wilayah yang masih belum dipungut pajak reklame di Kota Payakumbuh dan juga masih ada wajib pajak reklame yang dikenai sanksi berupa sanksi administrasi.

B. Saran

1. Wajib pajak reklame yang akan melaksanakan penyelenggaraan reklame harus memahami aturan tentang reklame beserta tata cara pemasangan reklame dengan tujuan agar terciptanya kesadaran dan disiplin aturan dari wajib pajak reklame tersebut. Kesadaran dari wajib

pajak dalam membayarkan pajaknya tepat waktu sangat berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerah tersebut.

Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh melalui petugasnya harus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame serta lebih aktif hingga ke tepian kota dalam mensosialisasikan pentingnya pembayaran pajak reklame tepat waktu serta menjelaskan sanksi yang diterima oleh wajib pajak apabila terlambat membayar pajak reklame. Selain itu DPPKA juga harus mengingatkan kepada subjek pajak reklame untuk menyuruh wajib pajak reklame membayar pajak reklamenya sebelum jatuh tempo, tidak hanya bisa dilakukan dengan sekali surat panggilan.

2. Aturan tentang pajak reklame yang ada di kota Payakumbuh harus diperbaharui karena saat ini di kota Payakumbuh masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 60 Tahun 2011 tentang tata cara pemasangan, standar harga dan penentuan nilai strategis serta penentuan nilai sewa reklame sebagai dasar penetapan besarnya pajak reklame. Menurut penulis dalam aturan yang ada pada saat ini tidak cukup lengkap mengatur tentang ruang lingkup reklame secara keseluruhan seperti ; ketentuan pembatalan reklame atau pencabutan izin, tata cara pemungutan pajak reklame, tentang pengawasan, prosedur pemberian sanksi, dan lainnya tidak tercantum.

Dengan adanya perubahan peraturan yang baru diharapkan terkait ruang lingkup reklame lebih jelas lagi dan lebih mudah dipahami masyarakat.

